

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2017.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2017, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai wujud pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Sumenep yang memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2017 ini juga merupakan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada masyarakat dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan strategik untuk mendukung budaya transparansi, yaitu lebih merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami harapkan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan	7
1. Visi	7
2. Misi	8
3. Tujuan dan Sasaran.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	10
1. Komitmen Kinerja Tahun 2017.....	10
2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja	16
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	16
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	17
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	18
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	21
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	27

Bab I

Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan Sekretaris Daerah sebagai Kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 17 Tahun 2012 dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Daerah dan menyelenggarakan fungsi, meliputi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
4. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;

5. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
7. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
9. Mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2017 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 4.118.688.646,-. Anggaran tersebut digunakan dalam rangka memenuhi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep tersebut, digunakan untuk melaksanakan 27 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional ;
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
 - f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
 - g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - h) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ;
 - i) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ;
 - j) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ;
 - k) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ;
 - l) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
 - m) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran ;
 - n) Kegiatan Pameran Pembangunan.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ;
 - d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :
 - a) Kegiatan Pengambilan dan Pendistribusian Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana;
 - b) Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
 - c) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR).
 - d) Kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

- 6) Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam :
 - a) Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.

- 7) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - a) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari permasalahan atau hambatan, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Di bawah ini beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep tahun 2017, antara lain:

- a) Terbatasnya kemampuan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani program dan perencanaan serta penanggulangan bencana ;
- b) Terbatasnya jumlah personil karena telah memasuki masa pensiun, mutasi jabatan (promosi) dan meninggal dunia, sampai saat ini belum ada penggantinya ;
- c) Belum tersedianya Dana On Call (Dana Siap Pakai/DSP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep guna membantu secara cepat dan tepat bagi masyarakat yang terkena bencana pada Saat Tanggap Darurat Bencana ;
- d) Belum tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep guna melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana khususnya pembangunan infrastruktur/fisik yang bukan merupakan domen/kewenangan/ wilayah Pekerjaan Umum (PU) ;
- e) Belum seluruhnya tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep guna melakukan penanganan tanggap darurat secara cepat dan tepat dari sektor infrastruktur yang terkena bencana alam, sehingga menunggu bantuan dari pusat dalam penanganan bencana longsor untuk melakukan pembangunan bronjong/semi permanen ;
- f) Belum tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep untuk melakukan perbaikan sektor infrastruktur yang terkena bencana alam pada tahapan Pasca-Bencana dalam rangka pemulihan ;

- g) Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya sarana komunikasi antar kecamatan utamanya kecamatan kepulauan.

2) Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas, diperlukan upaya-upaya pemecahan, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan motivasi yang mendorong etos kerja bagi Aparatur Pemerintah khususnya kemampuan ketrampilan menyusun program/rencana kegiatan serta rencana penanganan penanggulangan bencana ;
2. Diperlukan adanya penambahan personil yang mempunyai sehubungan dengan mutasi (promosi) pegawai serta pegawai yang sudah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia ;
3. Perlunya ketersediaan Dana On Call (Dana Siap Pakai/DSP) atau dana persediaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep pada Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, sehingga secara cepat dan tepat masyarakat yang terkena bencana dapat secara langsung diberikan bantuan pada Saat Tanggap Darurat Bencana ;
4. Perlunya ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep pada Pos Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep guna melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana khususnya pembangunan infrastruktur/fisik yang bukan merupakan domen/ kewenangan/wilayah Pekerjaan Umum (PU) ;
5. Perlunya ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep guna melakukan penanganan tanggap darurat secara cepat dan tepat dari sektor infrastruktur yang terkena bencana alam dan sebagian sudah diusulkan ke BNPB Pusat ;
6. Perlunya ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep untuk melakukan perbaikan sektor infrastruktur yang terkena bencana alam pada tahapan Pasca-Bencana dalam rangka pemulihan ;

7. Perlunya sarana alat komunikasi di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumenep khususnya di wilayah kecamatan/daerah rawan bencana dan kecamatan kepulauan.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1. VISI

Pada hakekatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mendukung visi Kabupaten Sumenep yang merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Sumenep harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Sumenep.

Pernyataan Visi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

“ S U P E R M A N T A P ”

Yaitu “ Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih,
Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ”

2. MISI

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep beserta seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep harus melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

Terdapat 6 (enam) misi yang ditetapkan untuk mencapai visi, dan yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep adalah misi 4 (empat) yaitu meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Pernyataan Misi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020 yang akan didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Sumenep sebagai kepala daerah terpilih, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang mendukung dari misi tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut:

Misi 4

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Tujuan 4.1

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah

Rumusan tujuan, sasaran dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sasaran.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2017 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep di tahun 2017 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

1. KOMITMEN KINERJA TAHUN 2017

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2017 dan kondisi capaian tahun Tahun 2017, digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, adalah sebagai berikut :

Misi 4

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan : Mewujudkan

Tujuan 4.1

tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perlindungan Masyarakat di BPBD Kabupaten Sumenep	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana	1. Nilai SKM Unit Layanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.544.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.850.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		133.600.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		53.890.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		7.377.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		19.839.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		21.800.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		20.320.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		31.200.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman		34.896.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		125.200.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		6.975.000	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	155.700.000
				Pameran Pembangunan	25.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60.000.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30.000.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	99.517.500
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.500.000
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	12.240.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	7.350.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.480.000
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Pengambilan dan Pendistribusian Buffer Stok dan Peralatan Bagi Korban Bencana	50.000.000
				Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	95.400.000

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran
				Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR)	205.124.000
				Penanggulangan Bencana Kebakaran	314.975.000
			Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam	Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	148.170.000
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial	90.000.000

2. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN

Dalam implementasi Sistem LKjIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing criteria kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 2.2
Pernyataan Keberhasilan Komitmen

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	> 100	seratus persen lebih	Sangat baik
2.	$85 \leq X \leq 100$	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Baik
3.	$70 \leq X < 85$	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Cukup
4.	$55 \leq X < 70$	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Kurang

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2017 yang telah kami uraikan pada Bab II.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2017. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak keberhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Misi 4

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Tujuan 4.1

Sasaran 4.1.2

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah

Tujuan Renstra : Meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep

Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana

Tabel 3.1.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	% Capaian Tahun 2017
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana	Nilai SKM Unit Layanan Publik	75	75	100%
	Persentase penanganan daerah rawan bencana	80	80	100%

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Misi 4

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Tujuan 4.1

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah

- Tujuan Renstra : Meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep
- Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana

Tabel 3.1.2
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017
 Dengan Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi		
			Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana	Nilai SKM Unit Layanan Publik	75	-	-	75
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Bencana	80	65,75	70,75	80

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Misi 4

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan: Mewujudkan

Tujuan 4.1

tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah

- Tujuan Renstra : Meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep
- Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana

Tabel 3.1.3

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2020	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana	Nilai SKM Unit Layanan Publik	80	75	93,75%
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Bencana	90%	80%	88,88%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Misi 4

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan: Mewujudkan

Tujuan 4.1

tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah

Tujuan Renstra : Meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep

Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana

- Indikator Nilai SKM Unit Layanan Publik ditargetkan sebesar 75 poin pada tahun 2017 dan mengalami realisasi sebesar 75 poin sehingga capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2015 dan 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep belum melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga perbandingannya tidak dapat diukur. Pada akhir Renstra Tahun 2020 diharapkan Nilai SKM Unit Layanan Publik mencapai target 80 poin, sehingga saat ini tingkat kemajuannya sebesar 93,75%.

- Indikator Persentase Penanganan Daerah Rawan Bencana ditargetkan sebesar 80% pada tahun 2017 dan mengalami realisasi sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Realisasi dari persentase penanganan daerah rawan bencana mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir Renstra Tahun 2020 diharapkan Persentase Penanganan Daerah Rawan Bencana mencapai target 90% sehingga saat ini tingkat kemajuannya sebesar 88,88%. Keberhasilan yang dicapai indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) program, yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam, serta Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Misi 4

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan: Mewujudkan

Tujuan 4.1

tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah

Tujuan Renstra : Meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep

Sasaran Renstra : Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana

Cost Per Outcome

1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.4

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana	1. Nilai SKM Unit Layanan Publik	920.278.500	50,45%
		2. Persentase Penanganan Daerah Rawan Bencana	903.669.000	49,55%
J U M L A H			1.823.947.500	

2. Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Alokasi	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	
<u>Sasaran 1</u> Terwujudnya sumber daya aparatur yang handal dalam rangka penanggulangan bencana	Prosentase tenaga penanggulangan bencana yang handal	100%	100%	100	668.269.000	647.373.900	96,87	3,13%
<u>Program :</u> 1.1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1.2. Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam								

<u>Sasaran 2</u>								
Terlaksananya penanganan bencana dan logistik secara cepat, tepat, efektif, dan efisien	Prosentase penanganan bencana dan logistik	80%	80%	100	145.400.000	144.500.000	99,38	0,62
<u>Program :</u>								
2.1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana								
<u>Sasaran 3</u>								
Terwujudnya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam / sosial	Jumlah lokasi penanggulangan dan penyelesaian bencana	10 lokasi	10 lokasi	100	90.000.000	90.000.000	100	0
<u>Program</u>								
3.1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi								

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Misi 4

Tujuan 4.1

Sasaran 4.1.2

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah

Tujuan Renstra : Meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumenep

Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan daerah rawan bencana

Sasaran 1 yaitu terwujudnya sumber daya aparatur yang handal dalam rangka penanggulangan bencana dengan indikator prosentase tenaga penanggulangan bencana yang handal memiliki target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga mengalami keberhasilan dengan didukung oleh 2 (dua) program, yakni Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, serta Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam, dengan anggaran sebesar Rp. 668.269.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 647.373.900,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 96,87% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 3,13%.

- 1.1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana merupakan kegiatan pelatihan bagi anggota Satuan Search And Rescue (SAR) BPBD Kabupaten Sumenep. Anggota Satuan SAR BPBD Kabupaten Sumenep berjumlah 30 orang. Pelatihan yang dilaksanakan berupa simulasi penyelamatan korban saat terjadi bencana.
- 1.2. Kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meliputi kegiatan simulasi pemadaman api serta penyelamatan korban saat terjadi kebakaran bagi 30 (tiga puluh) orang tenaga pemadam kebakaran di BPBD Kabupaten Sumenep.
- 1.3. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana termasuk dalam Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam. Kegiatan ini merupakan sosialisasi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Dengan membentuk Destana diharapkan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sumenep dapat berkurang dan kerugian yang ditimbulkan, baik berupa

korban jiwa maupun kerugian materi, mampu diminimalisir. Selama tahun 2016 telah berhasil dibentuk 1 (satu) Desa Tangguh Bencana yakni di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget. Sedangkan pada tahun 2017, terdapat 4 DESTANA yang berhasil dibentuk, yakni Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, Desa Langsar Kecamatan Saronggi, Desa Pajudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk, dan Desa Sindir Kecamatan Lenteng.

Sasaran 2 yaitu terlaksananya penanganan bencana dan logistik secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan indikator prosentase penanganan bencana dan logistik memiliki target kinerja sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% sehingga mengalami keberhasilan dengan didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 145.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.500.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 99,38% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 0,62%.

- 2.1. Kegiatan Pengambilan dan Pendistribusian Buffer Stok dan Peralatan Bagi Korban Bencana termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana meliputi penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana di antaranya tenda pengungsi, dapur umum, peralatan komunikasi, pelampung. Sedangkan barang logistik yang disediakan bagi korban bencana seperti makanan siap saji, selimut, sembako.
- 2.2. Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) termasuk dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Tenaga PUSDALOPS-PB di BPBD Kabupaten Sumenep berjumlah 16 (enam belas) orang yang siap memberi dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat, serta menyediakan data dan informasi terkait bencana.

Sasaran 3 yaitu terwujudnya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam / sosial dengan indikator jumlah lokasi penanggulangan dan penyelesaian bencana memiliki target kinerja sebesar 10 lokasi dan terealisasi sebesar 10 lokasi sehingga mengalami keberhasilan dengan didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 100% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 0%.

3.1. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial termasuk dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi rekonstruksi dan peningkatan kondisi sarana dan prasarana umum dalam rangka penanggulangan bencana, serta rehabilitasi atau perbaikan bangunan yang rusak akibat bencana. Pada tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di beberapa titik rawan bencana, di antaranya penguatan badan jalan di desa Banaresep Barat, Payudan Dungdang, Basoka, penguatan tebing sungai di desa Batuampar, Juluk, Batuan, dan Karduluk.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2.1

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	704.191.000	647.827.435
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.544.000	2.544.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.850.000	60.294.935
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	133.600.000	83.045.500
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	53.890.000	53.690.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.377.000	7.377.000
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.839.000	19.839.000
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.800.000	21.800.000
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.320.000	20.320.000
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.200.000	31.200.000
1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.896.000	34.896.000
1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	125.200.000	125.200.000
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	6.975.000	6.975.000
1.13	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	155.700.000	155.646.000
1.14	Pameran Pembangunan	25.000.000	25.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206.257.500	205.817.500
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60.000.000	59.560.000
2.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30.000.000	30.000.000
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	99.517.500	99.517.500
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.500.000	4.500.000
2.5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	12.240.000	12.240.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.350.000	1.700.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	7.350.000	1.700.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.480.000	2.480.000
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.480.000	2.480.000
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	665.499.000	643.703.900
5.1	Pengambilan dan Pendistribusian Buffer Stok dan Peralatan Bagi Korban Bencana	50.000.000	50.000.000
5.2	Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	95.400.000	94.500.000
5.3	Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR)	205.124.000	201.724.000
5.4	Penanggulangan Bencana Kebakaran	314.975.000	297.479.900
6	Program Pemantauan Potensi Dini Bencana Alam	148.170.000	148.170.000
6.1	Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	148.170.000	148.170.000
7	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90.000.000	90.000.000
7.1	Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial	90.000.000	90.000.000

Bab IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance.

Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran berikut capaian kerjanya, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep termasuk kategori **“Baik”**.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan rangkuman hasil evaluasi kinerja dari semua Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari masing-masing bidang pada umumnya bisa dikatakan baik. Meskipun begitu di dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran ini, harus dilakukan tindakan dan upaya untuk menanggulangnya. Dan diharapkan meskipun sedikit demi sedikit akan bisa menghilangkan kendala / hambatan yang ada menjadi tidak ada.